



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1357/KEP.GUB/INSPEKTORAT-1.1/2018

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Daerah kepada Gubernur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 34);

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tentang jadwal dan objek pemeriksaan (Obrik) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan ini agar dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Objek Pemeriksaan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan jadwal dan objek pemeriksaan akan dilakukan revisi jadwal pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 27-12-2018

Plt. GUBERNUR JAMBI



H. FACHRORI UMAR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Itjend Kemendagri RI;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (3 Eks);
5. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

NOMOR : 1352
TANGGAL : 27 DESEMBER 2018

No	JADWAL OPS	WIL / SUBBAG	OBJEK PENGAWASAN	RISIKO	KEGIATAN PENGAWASAN	SASARAN PENGAWASAN	PROGRAM PRIORITAS	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL PENGAWASAN	JUMLAH HARI MAKSIMAL	JUMLAH LAPORAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	JANUARI	WIL I, II, III	OPD PROVINSI JAMBI		Melakukan Pendampingan dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan 43 OPD	Pendampingan dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan 43 OPD		Laporan Keuangan	PJ 1 Koor 1 WP 3 Dainis 3 Katim 9 Anggota 31 Jumlah 48	10	1 Nota Dinas	
		WIL I, II, III	OPD PROVINSI JAMBI		Melakukan Pendampingan dan asistensi penyusunan Laporan Kinerja 43 OPD	Pendampingan dan asistensi penyusunan Laporan Kinerja 43 OPD		Laporan Kinerja	PJ 1 Koor 1 WP 3 Dainis 3 Katim 9 Anggota 31 Jumlah 48	10	1 Nota Dinas	
		TIM GABUNGAN	OPD PROVINSI JAMBI		Reviu Tender Pra DPA	Mengetahui RUP yang akan dilaksanakan oleh OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.		Penjabaran APBD tahun yang bersangkutan	Pj 1 WP 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 6 Jumlah 10	10	1 Nota Dinas	
		TIM GABUNGAN	OPD PROVINSI JAMBI		Reviu Penyerapan Anggaran/Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV Tahun 2018	Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran Belanja (Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos) dan PAD per Triwulan dan Mengetahui jumlah dan posisi PBJ yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang, ditandatangani kontrak, dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir Triwulan Tahun Anggaran 2018.		Penjabaran APBD tahun yang bersangkutan	Pj 1 WP 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 6 Jumlah 10	10	1 Nota Dinas	
		PERENC, EVALUASI & PELAPORAN	OPD PROVINSI JAMBI		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JAMBI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 WP 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	1 Nota Dinas	
			PEMERINTAH PROVINSI		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEND KEMENDAGRI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 WP 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	1 Nota Dinas	
			PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		KABUPATEN BATANGHARI	Katim Anggota Anggota	3 3 3	1 Nota Dinas
		JUMLAH										
		KABUPATEN MUARO JAMBI							Katim Anggota Anggota	3 3 3	1 Nota Dinas	
		JUMLAH										
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Katim Anggota Anggota	3 3 3	1 Nota Dinas									
JUMLAH												

		PEMERINTAH PROVINSI		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JAMBI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Katim	3	1 Nota Dinas	
								Anggota	3		
								JUMLAH			
							KABUPATEN MERANGIN	Katim	3	1 Nota Dinas	
								Anggota	3		
								JUMLAH			
							KABUPATEN SAROLAGUN	Katim	3	1 Nota Dinas	
								Anggota	3		
								JUMLAH			
							KABUPATEN BUNGO	Katim	3	1 Nota Dinas	
								Anggota	3		
								JUMLAH			
							KABUPATEN TEBO	Katim	3	1 Nota Dinas	
								Anggota	3		
								JUMLAH			
							KABUPATEN KERINCI	Katim	3	1 Nota Dinas	
								Anggota	3		
								JUMLAH			
							KOTA SUNGAI PENUH	Katim	3	1 Nota Dinas	
								Anggota	3		
								JUMLAH			
2	FEBRUARI	TIM GABUNGAN	OPD PROVINSI JAMBI		LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA	ULP & POJKA OPD	Lelang Pengadaan Barang & Jasa di atas Rp.200jt	PJ 1 1 Katim 1 Anggota 6 Jumlah 10	WP 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 6 Jumlah 10	10	1 LHP
		TIM GABUNGAN	OPD PROVINSI JAMBI		Pendampingan dan asistensi aset Diknas		Laporan Asct	PJ 1 1 Dainis 1 Katim 3 Anggota 9 Jumlah 15	WP 1 Dainis 1 Katim 3 Anggota 9 Jumlah 15	10	1 Nota Dinas
		Wilayah I	Rumah Sakit Jiwa Daerah		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik	PJ 1 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah	WP 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah	10	1 LHE
			Rumah Sakit Umum Daerah		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik	PJ 1 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah	WP 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah	10	1 LHE
			Dinas Kesehatan	D	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik	PJ 1 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah	WP 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah	10	1 LHE
			Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik	PJ 1 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	WP 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	10	1 LHE

		Wilayah III	KABUPATEN KERINCI		Pememksaan Akhir Masa Jabatan Bupati				PJ 1 Dainis 1 Katim 3 Anggota 9 Jumlah 15	WP 10 10 10 10 10		
		PERENC. EVALUASI & PELAPORAN	OPD PROVINSI JAMBI		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 Koor 1 Kabri 7 Anggota 14 Jumlah 24	WP 1 3		1 Nota Dinas
			PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ijen Kementerian/Lembaga	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pememksaan		KABUPATEN BATANGHARI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3 3		1 Nota Dinas
							KABUPATEN MUARO JAMBI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3 3			1 Nota Dinas
							KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3 3			1 Nota Dinas
							KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3 3			1 Nota Dinas
							KABUPATEN MERANGIN	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3 3			1 Nota Dinas
							KABUPATEN SAROLAGUN	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3 3			1 Nota Dinas
							KABUPATEN BUNGO	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3 3			1 Nota Dinas
							KABUPATEN TEBO	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3 3			1 Nota Dinas
							KABUPATEN KERINCI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3 3			1 Nota Dinas

								KOTA SUNGAI PENUH	Katim	3	1 Nota Dinas	
									Anggota	3		
									Anggota	3		
									JUMLAH			
									Total			
3	MARET	PEMERIKSAAN SERENTAK	PROVINSI JAMBI (DIKNAS PROV & BAKEUDA)		Pengawasan Dana Bos	Pengawasan Dana Bos TA 2018		SMA, SMA & SLB SELURUH KAB/KOTA	PJ 1 1 Dainis 3 Katim 11 Anggota 22 Jumlah 38	WP 10 han (5 Prov dan 5 Kab) 11 Kab/Kota	11 Nota Dinas	
		TIM GABUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI		REVIEW LAPORAN KEUANGAN DAERAH			LAPORAN KEUANGAN	PJ 1 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 9 Jumlah 13	WP 10	1 LHR	
		TIM GABUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI		REVIEW LAPORAN KINERJA DAERAH			LAPORAN KINERJA DAERAH	PJ 1 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 9 Jumlah 13	WP 10	1 LHR	
		TIM GABUNGAN	Pemerintah Provinsi Jambi		Reviu RPJMD			RPJMD	PJ 1 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 9 Jumlah 13	WP 10	1 LHR	
		PERENC. EVALUASI & PELAPORAN	OPD PROVINSI JAMBI		Tindak Lanjut Hasil Pemeksaan Inspektoral Daerah Provinsi Jambi dengan tujuan tertentu	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 WP 1 Koor 1 7 Katim Anggota 14 Jumlah 24	3	1 Nota Dinas	
			PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Tindak Lanjut Hasil Pengaduan Masyarakat	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat		5 Kabupaten/kota	Katim 5 Anggota 10 Jumlah 15	3	6 Nota Dinas	
4	April	PEMERIKSAAN SERENTAK	OPD Pemerintah Provinsi Jambi		Evaluasi LK	Mengukur ketercapaian indikator target kinerja		Laporan Kinerja Daerah	PJ 1 3 Dainis 3 Koord 3 Katim 3 Anggota 37 Jumlah 48	WPJ 10	1 LHE	
		Tim Gabungan	OPD PROVINSI JAMBI		Reviu Penerapan Anggaran, PBJ dan P3DN Triwulan 1	Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran Belanja (Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos) dan PAD per Triwulan dan Mengetahui jumlah dan posisi PBJ yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang, ditandatangani kontrak, dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir Triwulan Tahun Anggaran 2017		LPPK OPD	PJ 1 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 8 Jumlah 10	WP 10	1 LHR	

	Wilayah I	Kota Sei. Penuh	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengawasan (Romawi 1 huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019)	sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dahis 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah 11	3 10 10 10 10 10		
	Wilayah II	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengawasan (Romawi 1 huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019)	sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dahis 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah 11	3 10 10 10 10		
	Wilayah III	Kabupaten Tebo	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengawasan (Romawi 1 huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019)	sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dahis 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah 11	3 10 10 10 10		
	PERENC. EVALUASI & PELAPORAN	OPD PROVINSI JAMBI	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JAMBI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	PROVINSI JAMBI	PJ 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	9	Nota Dinas
		PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEND KEMENDAGRI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	PROVINSI JAMBI	PJ 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	9	Nota Dinas
		Pemerintah Kabupaten/Kota	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	KABUPATEN BATANGHARI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1	Nota dinas
					KABUPATEN MUARO JAMBI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1	Nota dinas
					KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1	Nota dinas
					KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1	Nota dinas
					KABUPATEN MERANGIN	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1	Nota dinas
					KABUPATEN SAROLAGUN	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1	Nota dinas
					KABUPATEN BUNGO	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1	Nota dinas
					KABUPATEN TEBO	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1	Nota dinas
					KABUPATEN KERINCI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1	Nota dinas

						KOTA SUNGAI PENUH	Katim Anggota	3	1 Nota dinas	
							Anggota	3		
							JUMLAH	3		
Mei	PEMERIKSAAN SERENTAK	10 Kabupaten/kota		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.	Dana Desa	PJ 1 3 Koord 1 Dalnis 10 Katim 30 Anggota 55 Jumlah	5	11 Nota Dinas	
		Kab. Ma. Jambi		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.	Dana Desa	PJ Koodinator	20 20		
		Kab. Balanghari		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.	Dana Desa	PJ WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	0 5 0 5 5 5 5 5	1 LHP	11.947.000
		Kab. Tanjabtim		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.	Dana Desa	Jumlah PJ WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	0 5 0 5 5 5 5 5	1 LHP	12.032.600
		Kab. Tanjabbar		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.	Dana Desa	Jumlah PJ WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	0 5 0 5 5 5 5 5	1 LHP	12.096.800
		Kab. Merangin		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.	Dana Desa	Jumlah PJ WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	0 5 0 5 5 5 5 5	1 LHP	24.550.000
		Kab. Sarolangun		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.	Dana Desa	Jumlah PJ 1 WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota Anggota	0 5 0 5 5 5 5 5	1 LHP	24.686.000
							Jumlah			

	Kab. Bungo		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.		Dana Desa	<table border="1"> <tr><td>PJ</td><td>0</td><td>1 LHP</td><td>24.950.000</td></tr> <tr><td>WPJ</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Koodinator</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dalnis</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Katim</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	PJ	0	1 LHP	24.950.000	WPJ	5			Koodinator	0			Dalnis	5			Katim	5			Anggota	5			Anggota	5			Anggota	5			Jumlah			
PJ	0	1 LHP	24.950.000																																								
WPJ	5																																										
Koodinator	0																																										
Dalnis	5																																										
Katim	5																																										
Anggota	5																																										
Anggota	5																																										
Anggota	5																																										
Jumlah																																											
	Kab. Tebo		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.		Dana Desa	<table border="1"> <tr><td>PJ</td><td>0</td><td>1 LHP</td><td>24.710.000</td></tr> <tr><td>WPJ</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Koodinator</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dalnis</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Katim</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	PJ	0	1 LHP	24.710.000	WPJ	5			Koodinator	0			Dalnis	5			Katim	5			Anggota	5			Anggota	5			Anggota	5			Jumlah			
PJ	0	1 LHP	24.710.000																																								
WPJ	5																																										
Koodinator	0																																										
Dalnis	5																																										
Katim	5																																										
Anggota	5																																										
Anggota	5																																										
Anggota	5																																										
Jumlah																																											
	Kab. Kerinci		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.		Dana Desa	<table border="1"> <tr><td>PJ</td><td>0</td><td>1 LHP</td><td>26.712.000</td></tr> <tr><td>WPJ</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Koodinator</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dalnis</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Katim</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	PJ	0	1 LHP	26.712.000	WPJ	5			Koodinator	0			Dalnis	5			Katim	5			Anggota	5			Anggota	5			Anggota	5			Jumlah			
PJ	0	1 LHP	26.712.000																																								
WPJ	5																																										
Koodinator	0																																										
Dalnis	5																																										
Katim	5																																										
Anggota	5																																										
Anggota	5																																										
Anggota	5																																										
Jumlah																																											
	Kota Sel. Penuh		Monitoring Dana Desa	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.		Dana Desa	<table border="1"> <tr><td>PJ</td><td>0</td><td>1 LHP</td><td>26.712.000</td></tr> <tr><td>WPJ</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Koodinator</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dalnis</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Katim</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	PJ	0	1 LHP	26.712.000	WPJ	5			Koodinator	0			Dalnis	5			Katim	5			Anggota	5			Anggota	5			Anggota	5			Jumlah			
PJ	0	1 LHP	26.712.000																																								
WPJ	5																																										
Koodinator	0																																										
Dalnis	5																																										
Katim	5																																										
Anggota	5																																										
Anggota	5																																										
Anggota	5																																										
Jumlah																																											
TIM GAB	Pemerintah Provinsi Jambi		Reviu RKP	Menguji kesesuaian dan relevansi tujuan, sasaran, indikator, dan target pemerintah daerah dengan kondisi terkini.		RKPD	<table border="1"> <tr><td>PJ 1</td><td>WP</td><td>10</td><td>1 LHR</td><td></td></tr> <tr><td>Dalnis 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Katim 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jumlah 10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	PJ 1	WP	10	1 LHR		Dalnis 1					Katim 1					Anggota 6					Jumlah 10															
PJ 1	WP	10	1 LHR																																								
Dalnis 1																																											
Katim 1																																											
Anggota 6																																											
Jumlah 10																																											
TIM GAB	Pemerintah Provinsi Jambi		Reviu Renja dan KUPPAS	Menguji kesesuaian dan relevansi tujuan, sasaran, indikator, dan target pemerintah daerah dengan anggaran yang diajukan dalam KUA-PPAS.		Renja	<table border="1"> <tr><td>PJ 1</td><td>WP</td><td>10</td><td>1 LHR</td><td></td></tr> <tr><td>Dalnis 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Katim 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jumlah 10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	PJ 1	WP	10	1 LHR		Dalnis 1					Katim 1					Anggota 6					Jumlah 10															
PJ 1	WP	10	1 LHR																																								
Dalnis 1																																											
Katim 1																																											
Anggota 6																																											
Jumlah 10																																											
TIM GAB	OPD Pemerintah Provinsi Jambi		Diagnostic Assesment / Maturitas SPIP			SPIP	<table border="1"> <tr><td>PJ 1</td><td>WP</td><td>30</td><td>1 Nota Dinas</td><td></td></tr> <tr><td>Dalnis 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Katim 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota 9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jumlah 13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	PJ 1	WP	30	1 Nota Dinas		Dalnis 1					Katim 1					Anggota 9					Jumlah 13															
PJ 1	WP	30	1 Nota Dinas																																								
Dalnis 1																																											
Katim 1																																											
Anggota 9																																											
Jumlah 13																																											
WIL I	Kabupaten Batanghari		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019	<table border="1"> <tr><td>PJ 1</td><td></td><td>3</td><td>1 LHP</td><td>41.220.000</td></tr> <tr><td>WPJ 1</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dalnis 1</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Katim 2</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anggota 6</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	PJ 1		3	1 LHP	41.220.000	WPJ 1		10			Dalnis 1		10			Katim 2		10			Anggota 6		10			Jumlah										
PJ 1		3	1 LHP	41.220.000																																							
WPJ 1		10																																									
Dalnis 1		10																																									
Katim 2		10																																									
Anggota 6		10																																									
Jumlah																																											

		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan	PJ 1 1 Dalnis 1	WP 1	5 Prov. 5 Kab/Kota	1 LHP	
		Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan	PJ 1 1 Dalnis 1	WP 1	5 Prov. 5 Kab/Kota	1 LHP	
	WIL II	Dinas Perkebunan	Tinggi	Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dalnis 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah 11		10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	
		Dinas Lingkungan Hidup		Pemeriksaan Kinerja (Audit Kinerja)	a. Pelaksanaan Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang Lingkungan Hidup b. Perkembangan atau Capaian SPM dan pelaksanaan penerapan NSPK di bidang Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian c. Pelaksanaan atas pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan d. Pelaksanaan capaian/perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup	Pengawasan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	a. Pelaksanaan Kebijakan daerah yang bersifat strategis dan teknis operasional. B. Pelaksanaan penerapan NSPK. C. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan. D. Pelaksanaan indikator kinerja bidang Lingkungan Hidup	PJ 1 WPJ 1 Dalnis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7		5 Prov. 5 Kab/Kota	1 LHP	
	WIL III	Disbudpar	Tinggi	Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 1 Dalnis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	WP 1	5 Prov. 5 Kab/Kota	1 LHP	
		Kota Jambi		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dalnis 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah 11		10		
	PERENC, EVALUASI & PELAPORAN	OPD PROVINSI JAMBI YANG DIPERIKSAN ITJEN KEMENDAGRI		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan IJen Kemendagri	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	WP 1	3	1 Nota Dinas	
		PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Jambi	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		KABUPATEN BATANGHARI	Katim Anggota Anggota JUMLAH		3 3 3	1 LHP	
							KABUPATEN MUARO JAMBI	Katim Anggota Anggota JUMLAH		3 3 3	1 LHP	

								KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Katim Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Katim Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN MERANGIN	Katim Anggota JUMLAH	3 3 2	1 LHP	
								KABUPATEN SAROLAGUN	Katim Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN BUNGO	Katim Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN TEBO	Katim Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN KERINC	Katim Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KOTA SUNGAI PENUH	Katim Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
6	Juni	WIL I	Onas Pengambilan Modal dan PTSP	Pemerksaan Kinerja (Audit Kinerja)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)			sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPU 1 Dainic 1 Katim 3 Anggota 3 Jumlah 7	5 Prov. 5 Kab/Kota	1 LHP	
			Sekretariat DPRD	Pemerksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)			sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPU 1 Dainic 1 Katim 1 Anggota 5 Jumlah 9	10		
			Kabupaten Merangin	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)			sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPU 1 Dainic 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah 11	3 10 10 10 10		

		WIL II	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sangat Tinggi	Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	a. Pelaksanaan Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang Pekerjaan Umum dan PR b. Perkembangan atau Capaian SPM dan pelaksanaan penerapan NSPK di bidang Pekerjaan Umum, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian c. Pelaksanaan atas pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan d. Pelaksanaan capaian/perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan PR		a. Pelaksanaan Kebijakan daerah yang bersifat strategis dan teknis operasional. B. Pelaksanaan penerapan NSPK. C. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan. D. Perkembangan dan atau capaian SPM dan Pelaksanaan indikator kinerja urusan bidang Pekerjaan Umum dan PR.	PJ 1 WPJ 1 Dalnis 1 Katim 3 Anggota 9 Jumlah 15	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	
			Kab. Bungo		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang akan dilaksanakan.		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ WPJ Dalnis Katim Anggota	3 10 10 10 10	1 LHP	75.550.000
		Wilayah III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang	Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dalnis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	
			Dinas Perhubungan		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan	PJ 1 WPJ 1 Dalnis 1 Katim 1	5 Prov, 5 Kab/Kota	1 LHP	
			Kabupaten Sarolangun		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)			PJ WPJ Dalnis Katim Anggota	3 10 10 10 10	1 LHP	75.550.000
		PERENC, EVALUASI & PELAPORAN	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Tindak Lanjut Hasil Pengaduan Masyarakat	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil Pengaduan Masyarakat		KABUPATEN/KOTA	Katim 5 Anggota 10 Jumlah 15	3 3	1 Nota Dinas	
			OPD PROVINSI JAMBI		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan tujuan tertentu	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	1 Nota Dinas	
7	Juli	TIM GAB	11 Kabupaten/Kota		Evaluasi LKJ Kabupaten	Mengukur ketercapaian indikator target kinerja		LKJ Kabupaten	PJ 1 3 Koord 1 Dalnis 11 Katim 11 Anggota 33 Jumlah 60	11 Kab/Kota	11 LHE	
									PJ Koodinator	10 10		

		Kota Jambi							PJ	0	1 LHP	6.300.000
									WPJ	7		
									Koodinator	0		
									Dalnis	7		
									Katim	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Jumlah			
		Kabupaten Batanghari							PJ	0	1 LHP	
									WPJ	7		
									Koodinator	0		
									Dalnis	7		
									Katim	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Jumlah			
		Kabupaten Ma. Jambi							PJ	0	1 LHP	
									WPJ	7		
									Koodinator	0		
									Dalnis	7		
									Katim	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Jumlah			
		Kabupaten Tanjablim							PJ	0	1 LHP	
									WPJ	7		
									Koodinator	0		
									Dalnis	7		
									Katim	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Jumlah			
		Kabupaten Tanjabbar							PJ	0	1 LHP	
									WPJ	7		
									Koodinator	0		
									Dalnis	7		
									Katim	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Jumlah			
		Kabupaten Merangin							PJ	0	1 LHP	
									WPJ	7		
									Koodinator	0		
									Dalnis	7		
									Katim	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Jumlah			
		Kabupaten Sarolangun							PJ	0	1 LHP	
									WPJ	7		
									Koodinator	0		
									Dalnis	7		
									Katim	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Anggota	7		
									Jumlah			

		Kabupaten Bungo						PJ WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota	0 7 0 7 7 7 7	1 LHP	
								Jumlah			
		Kabupaten Tebo						PJ WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota	0 7 0 7 7 7 7	1 LHP	
								Jumlah			
		Kabupaten Kerinci						PJ 1 WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota	0 7 0 7 7 7 7	1 LHP	
								Jumlah			
		Kota Sei. Penuh						PJ WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota	0 7 0 7 7 7 7	1 LHP	
								Jumlah			
				Evalcasi LPPD Kabupaten			LKPPD Kabupaten	PJ 1 WP 3 Koord 1 Dalnis 11 Katim 11 Anggota 33 Jumlah 60	3 hari Provinsi 7 hari Kab	11 LHE	
		Kota Jambi						PJ WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota	7 7 7 7 7 7 7	1 LHP	
								Jumlah			
		Kabupaten Batanghari						PJ WPJ Koodinator Dalnis Katim Anggota Anggota	7 7 7 7 7 7 7	1 LHP	
								Jumlah			

		Kabupaten Ma. Jambi						PJ	7	1 LHP	
								WPJ	7		
								Koordinator	7		
								Dalnis	7		
								Katim	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Jumlah			
		Kabupaten Tanjablim						PJ	7	1 LHP	
								WPJ	7		
								Koordinator	7		
								Dalnis	7		
								Katim	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Jumlah			
		Kabupaten Tanjabbar						PJ	7	1 LHP	
								WPJ	7		
								Koordinator	7		
								Dalnis	7		
								Katim	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Jumlah			
		Kabupaten Merangin						PJ	7	1 LHP	
								WPJ	7		
								Koordinator	7		
								Dalnis	7		
								Katim	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Jumlah			
		Kabupaten Serolangun						PJ	7	1 LHP	
								WPJ	7		
								Koordinator	7		
								Dalnis	7		
								Katim	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Jumlah			
		Kabupaten Bungo						PJ	7	1 LHP	
								WPJ	7		
								Koordinator	7		
								Dalnis	7		
								Katim	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Jumlah			
		Kabupaten Tebo						PJ	7	1 LHP	
								WPJ	7		
								Koordinator	7		
								Dalnis	7		
								Katim	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Anggota	7		
								Jumlah			

			Kabupaten Kerinci						PJ WPJ Koodinator Dainis Katim Anggota Anggota	7 7 7 7 7 7	1 LHP	
			Kota Sei. Penuh						Jumlah PJ WPJ Koodinator Dainis Katim Anggota Anggota	7 7 7 7 7 7	1 LHP	
									Jumlah PJ WPJ Dainis Katim Anggota Anggota	7 7 7 7 7		
		WIL I	Dinas Kesehatan	Sangat Tinggi	Pemenuhan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah 11	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)		1 LHP
			Dinas Kesehatan RSUD Rd Matlaher Rumah Sakit Jwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Kehutanan		Reviu DAK Fisik TA Sebelumnya	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA Sebelumnya			PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 5 Anggota 15 Jumlah 23	10		5 LHR
		WIL II	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Tinggi	Pemenuhan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah 11	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)		1 LHP
			Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perkebunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Reviu DAK Fisik TA Sebelumnya	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA Sebelumnya			PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 4 Anggota 12 Jumlah 19	10		
		WIL III	Dinas Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan		Reviu DAK Fisik TA Sebelumnya	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA Sebelumnya			PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 4 Anggota 12 Jumlah 19	10		4 LHP

	TIM GAB	OPD Pemerintah Provinsi Jambi		Revisi RKPD Perubahan TA. 2019	Menguji kesesuaian dan relevansi tujuan, sasaran, indikator, dan target pemerintah daerah dengan kondisi terkini.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH (Kegiatan Pengendalian manajemen)	Rancangan Akhir RKPD Perubahan TA. 2019	PJ 1 1 Dahis 1 Katim 1 Anggota 9 Jumlah 13	10	1 LHR	
	TIM GAB	OPD Pemerintah Provinsi Jambi		Revisi Renja dan KUA-PPAS Perubahan TA. 2019	Menguji kesesuaian dan relevansi tujuan, sasaran, indikator, dan target pemerintah daerah dengan anggaran yang diajukan dalam KUPPAS.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH (Kegiatan Pengendalian manajemen)	Rancangan Akhir Renja dan KUA-PPAS Perubahan TA. 2019	PJ 1 1 Dahis 1 Katim 1 Anggota 9 Jumlah 13	10	1 LHR	
	PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN	OPD PROVINSI JAMBI		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JAMBI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 WP 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	1 Nota Dinas	
		PEMERINTAH PROVINSI		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMENDAGRI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 WP 1 Koor 1 Katim 9 Anggota 18 Jumlah 30	3	9 nota dinas	
		PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		KABUPATEN MUARO JAMBI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
							KABUPATEN BATANGHARI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
							KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
							KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
							KABUPATEN MERANGIN	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
							KABUPATEN SAROLAQUH	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
							KABUPATEN BUNGO	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
							KABUPATEN TEBO	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
							KABUPATEN KERINCI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
							KOTA SUNGAI PENUH	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 Nota Dinas	
Agustus	TIM GAB	OPD Pemerintah Provinsi Jambi	Tim Gab	Revisi Penyerapan Anggaran, PBJ dan P3DN Triwulan 2			LPPK	PJ 1 1 Dahis 1 Katim 1 Anggota 6 Jumlah 10	10		

		PEMERIKSAAN SERENTAK	Pemerintah Provinsi Jambi		Revisi RKA-Perubahan	Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran Belanja (Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Baris) dan PAD per Triwulan dan Mengetahui jumlah dan posisi PBI yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan penitang, ditandatangani kontrak, dan hasil penyelesaian aset, pekerjaan/pada		LPPK OPD	PJ 1 3 Dainis 3 Katim 3 Anggota 24 Jumlah 34	10	1 LHR	
		WIL I	Rumah Sakit Umum Daerah	Sangat Tinggi	Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)			sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 3 Anggota 9 Jumlah 15	10	1 LHP	
			Rumah Sakit Jawa Daerah		Pemeriksaan Kinerja (Audit Kinerja)	Kegiatan Pengawasan (Romawi huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah 11	10	1 LHP	
		WIL II	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral	Sedang	Pemeriksaan Kinerja (Audit Kinerja)	Kegiatan Pengawasan (Romawi huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang	Pemeriksaan Kinerja (Audit Kinerja)	Kegiatan Pengawasan (Romawi huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	
			Kabupaten Muaro Jambi		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis	Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis	1. Pengawasan Umum Pembagian Urusan Pemerintahan, Keuangan daerah, Perencanaan Pembangunan	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 2 Anggota 6 Jumlah	3 10 10 10 10	1 LHP	41.220.000
		Wilayah III	Dinas Pendidikan	Sangat Tinggi	Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		PROVINSI JAMBI	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 3 Anggota 9 Jumlah 15	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	

		PERENC. EVALUASI & PELAPORAN	OPD PROVINSI JAMBI YANG DIPERIKSAAN ITJEN KEMENDAGRI		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kemendagri	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 WP 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	1 Nota Dinas	
					Tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		5 Kab/Kota	Katim 5 anggota 10 jumlah 15	3	6 LHP	
	September	TIM GAB	OPD Pemerintah Provinsi Jambi		Reviu RKA Mumi	Menguji kesesuaian dan relevansi tujuan, sasaran, indikator, dan target pemerintah daerah dengan RKA.		Reviu RKA Mumi 2019	PJ 1 Koor 1 WP 3 Dalnis 3 Katim 9 Anggota 31 Jumlah 48	10	3 LHR	
		TIM GAB	Pemerintah Provinsi Jambi		Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Menguji relevansi Perda dan Perkada terhadap kondisi terkini dan peraturan perundang-undangan yang baru.		Perda dan Perkada	PJ 1 WP 1 Koord 1 Dalnis 1 Katim 1 Anggota 6 Jumlah 11	10	1 LHP	
		WIL I	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dalnis 1 Katim 3 Anggota 9 Jumlah 15	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	
			Dinas Kehutanan		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi I huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dalnis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	
		WIL II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	a. Pelaksanaan Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk b. Perkembangan atau Capaian SPM dan pelaksanaan penerapan NSPK di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian c. Pelaksanaan atas pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan d. Pelaksanaan capaian/perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Pengawasan teknis urusan pemerintahan bidang PP dan PA, bidang Pengendalian Penduduk dan KB dan bidang PMD	a. Pelaksanaan Kebijakan daerah yang bersifat strategis dan teknis operasional. B. Pelaksanaan penerapan NSPK C. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan. D. Pelaksanaan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	PJ 1 WPJ 1 Dalnis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	

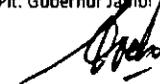
			Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Pemeriksaan Kinerja (Audit Kinerja)	a. Pelaksanaan Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang Koperasi dan UKM b. Perkembangan atau Capaian SPM dan pelaksanaan penerapan NSPK di bidang Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian c. Pelaksanaan atas pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan		a. Pelaksanaan Kebijakan daerah yang bersifat strategis dan teknis operasional B. Pelaksanaan penerapan NSPK C. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan D. Pelaksanaan indikator kinerja bidang Koperasi dan UKM	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	
		WIL III	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi) huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 3 Anggota 9 Jumlah 15	10 hari (5 Prov dan 5 Kab)	1 LHP	
		PERENC. EVALUASI	OPD Provinsi Jambi		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektoral	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		KABUPATEN/KOTA	PJ 1 WP 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	1 Nota Dinas	
			Pemerintah Kab/Kota		Tindak lanjut hasil pengawasan tim	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		KABUPATEN MUARO JAMBI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3		5.207.000
								KABUPATEN BATANGHARI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN MERANGIN	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN SAROLAGUN	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN BUNGO	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN TEBO	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KABUPATEN KERINCI	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								KOTA SUNGAI PENUH	Katim Anggota Anggota JUMLAH	3 3 3	1 LHP	
								Total				
10	OKTOBER	WIL I	Badan Penghubung		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi) huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WP 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 3 Jumlah 7	7 (luar Provinsi)		

		Dinas Kesehatan RSUD Rd Mattaher Rumah Sakit Jwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Kehutanan		Reviu DAK Fisk Tahap I Tahun 2019	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisk Tahap I			PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Kabim 5 Anggota 15 Jumlah 23	10	5 LHP	
		OPD yang melaksanakan pelayanan publik (RSUD, RSJ, DPM-PTSP, Dinkes, Lapkes dan Bapelkes)		Evaluasi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bereformasi dan Melayani	10 OPD yang dicanangkan sebagai objek OPD wilayah bebas korupsi		Pelayanan Publik, SPM dan SPI	PJ 1 WP 1 Dainis 4 Kabim 4 Anggota 12 Jumlah 22	10	1 LHP	
	Wilayah II	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perkebunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Reviu DAK Fisk Tahap I Tahun 2019	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisk Tahap I			PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Kabim 4 Anggota 12 Jumlah 19	10	1 LHP	
	Wilayah III	Dinas Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan		Reviu DAK Fisk Tahap I Tahun 2019	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisk Tahap I			PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Kabim 4 Anggota 12 Jumlah 19	10	1 LHP	
		Bakauda		Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasional)	Kegiatan Pengawasan (Romawi huruf E Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019)		sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Kabim 2 Anggota 6 Jumlah 11	10 (5 Prov. 5 Kab/Kota)	1 LHP	
	TIM GAB	CPD yang dilihat dari sisi anggaran yang besar dan banyak nya hasil temuan BPK		Risk and Audit Universe	Resiko kemungkinan yang terjadi pada masing- masing OPD		Tupoksi, SDM, Aset dan Keuangan	PJ 1 WP 3 Koordinator 1 Dainis 3 Kabim 3 Anggota 9 Jumlah 20	10	1 Nota Dinas	
		OPD Pemerintah Provinsi Jambi	Tim Gab	Reviu Penyerapan Anggaran, PBJ dan P3DN Triwulan 3	Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran Belanja (Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos) dan PAD per Triwulan dan Mengetahui jumlah dan posisi PBJ yang telah dilakukan pelelangan, dietapkan pemenang, ditandatangani kontrak, dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir Triwulan Tahun Anggaran 2018		LPPK	PJ 1 WP 1 Dainis 1 Kabim 1 Anggota 8 Jumlah 10	10	1 Nota Dinas	
	PERENC, EVALUASI & PELAPORAN	CPD PROVINSI JAMBI		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JAMBI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 WPJ 1 Koor 1 Kabim 9 Anggota 18 Jumlah 30	3	1 Nota Dinas	

			PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN IT..ENDO KEMENDAGRI JAMBI	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 Koor 1 WPJ 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	1 Nota Dinas	
			PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN			KABUPATEN MUARO JAMBI	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
								KABUPATEN BATANGHARI	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
								KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
								KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
								KABUPATEN MERANGIN	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
								KABUPATEN SAROLAGUN	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
								KABUPATEN BUNGO	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
								KABUPATEN TEBO	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
								KABUPATEN KERINCI	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
								KOTA SUNGAI PENUH	Katim Anggota Anggota 3	3 3 3		
11	NOVEMBER	WIL III	Kabupaten Kerinci		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis	Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis	1. Pengawasan Umum . Pembagian Urusan Pemerintahan, Keuangan daerah, Perencanaan Pembangunan	PJ 1 WPJ 1 Dainis 1 Katim 2 Anggota 4 Jumlah 9	3 10 10 10 10		
		TIM GAB	INSPEKTORAT PROV JAMBI		Peningkatan Kapabilitas APiP				PJ 1 1 Dainis 1 Katim 1 Anggota 9 Jumlah 13	30	1 Nota Dinas	

			PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Tindak Lanjut Hasil Pengaduan Masyarakat	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil Pengaduan Masyarakat		PROVINSI JAMBI	Katim 5 Anggota 10 Jumlah 15	3 3	6 Nota Dinas	
12	DESEMBER	WIL I	Dinas Kesehatan RSUD Rd Mattaher Rumah Saki Jwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Kehutanan		Reviu DAK Fisk Tahap II Tahun 2019	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisk Tahap II			PJ 1 WPJ 1 Dains 1 Katim 5 Anggota 15 Jumlah 23	10	5 LHP	
		Wil II	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perkebunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Reviu DAK Fisk Tahap II Tahun 2019	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisk Tahap II			PJ 1 WPJ 1 Dains 1 Katim 4 Anggota 12 Jumlah 19	10	5 LHP	
		Wil III	Dinas Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan		Reviu DAK Fisk Tahap II Tahun 2019	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisk Tahap II			PJ 1 WPJ 1 Dains 1 Katim 4 Anggota 12 Jumlah 19	10	5 LHP	
		TIM GAB	OPD PROVINSI JAMBI		Stok Opname dan Kas Opname	Mengetahui posisi kas pada Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan mengetahui sisa persediaan pada pengurus barang pengguna per 31 Desember 2019 pada 43 OPD Provinsi Jambi		Laporan Barang dan Laporan Keuangan	PJ 1 WP 3 Koord 1 Dains 3 Katim 3 Anggota 37 Jumlah 48	5	1 Nota Dinas	
		PERENC. EVALUASI & PELAPORAN	OPD PROVINSI JAMBI		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektoral	Mengetahui persentase dan progres penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan		PROVINSI JAMBI	PJ 1 WP 1 Koor 1 Katim 7 Anggota 14 Jumlah 24	3	1 Nota Dinas	

Pt. Gubernur Jambi



H. FACHRORI UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp 2.594.143.700	
2.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 2.348.418.700	
3.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rp 1.104.513.900	
JUMLAH		Rp 6.047.076.300	

Plt. Gubernur Jambi



H. FACHRORI UMAR